

### **BAB III**

## **AWAL KEMUNCULAN ISIS SERTA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DONALD TRUMP DAN BARRACK OBAMA TERHADAP ISIS**

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan tentang awal mula kemunculan ISIS yang kemudian akan dijelaskan juga tujuan dan cita-cita ISIS yang menyebabkan Amerika Serikat, baik pada masa Obama dan Trump untuk memfokuskan politik luar negerinya ke ISIS. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana Barrack Obama dan Donald Trump menentukan kebijakan luar negerinya dalam merespon keberadaan ISIS yang mengganggu keamanan dan kepentingan Amerika Serikat.

#### **A. Kemunculan ISIS**

*Islamic State of Iraq and Syria* atau yang bisa disebut sebagai ISIS merupakan suatu kelompok ekstremis Islam yang berawal dari kelompok Al-Qaeda cabang Irak (AQI) yang didirikan oleh Abu Musab al Zarqawi pada tahun 2004. AQI sempat memudar ketika Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2007, namun setelah invasi Amerika Serikat berakhir ketika Amerika Serikat menyatakan kemenangan, AQI mulai muncul kembali menebar teror dan meningkatkan pasukannya yang membuat AQI berkembang selama beberapa tahun dengan memanfaatkan ketidakstabilan kondisi di negara Irak dan Suriah (Wilson Center, 2019).

Pada tahun 2004, Abu Musab al Zarqawi, seorang mantan milisi Islam Afghanistan yang pernah berperang melawan Uni Soviet, mendirikan suatu kelompok ekstremis di Irak yaitu Jamaah Tauhid dan Jihad (JTJ). Kemudian pada tahun yang sama Al-Zarqawi yang memimpin JTJ menyatakan kesetiaan dan membuat perjanjian dengan Al-Qaeda hingga kemudian JTJ resmi menjadi kelompok Al-Qaeda cabang Irak (AQI).

Pada tahun 2006 Al-Qaeda kemudian memerintahkan AQI untuk berkerjasama dengan kelompok-kelompok ekstremis yang juga berafiliasi dengan Al-Qaeda yaitu Jaish At-Taifha Al Mansoura, Katbiyan ,Ansar At-Tawhid was-Sunnah, Faksi Saray Al-Jihad, Brigade Al-Ghuraba, dan Al-Ahwal Brigade yang

kemudian terbentuklah Mujahedeen Syuraa Council (MSC) (Tambunan, 2014).

Pemimpin AQI, Zarqawi terbunuh pada tahun 2006 setelah pasukan udara Amerika Serikat menembaknya di dekat pusat kota Baquba (The Economist, 2006). Pada tahun 2006 selepas kematian Zarqawi, aliansi MSC sepakat untuk membentuk *Islamic State of Iraq* (ISI) dengan menunjuk Abu Omar Al Quroisy Al Hussaini Al Baghdadi yang merupakan mantan anggota pasukan keamanan Irak yang dipecat karena ideologi ekstrimisnya sebagai ketuanya. (Tambunan, 2014)

Dalam aksinya, ISI seringkali menebar ketakutan dengan melakukan bom bunuh diri sehingga sangat meresahkan masyarakat Irak. Hal tersebut menyebabkan kekuasaan Abu Omar Al Baghdadi tidak berlangsung lama, Al Baghdadi tewas dibunuh pasukan Amerika Serikat yang beroperasi bersama pasukan keamanan Irak pada tahun 2013 (Tambunan, 2014) .

Kepemimpinan ISI kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Al Baghdadi dimana pada era Abu Bakar Al Baghdadi ISI menyatakan bergabung *bersama* sebuah kelompok jihadis pemberontak asal Suriah yaitu Jabhat An-Nusra (JN) dan membentuk kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Tetapi kemudian JN malah menyatakan bahwa JN tidak bersedia bergabung dengan ISI karena JN hanya berfokus pada perjuangannya memberontak rezim Bashar Al-Assad di Suriah (Tambunan, 2014).

*Al-Qaeda* juga kemudian mengikuti jejak JN untuk memutuskan hubungan dengan ISIS karena menurut Al-Qaeda, ISIS justru memperburuk citra Islam dengan aksi terornya seperti pembunuhan dan bom bunuh diri yang menjadikan masyarakat Irak dan Suriah yang beragama muslim sebagai sasarannya (Tambunan, 2014).

Pada tahun 2014, ISIS melancarkan serangan di bagian timur Suriah dan barat laut Irak merebut kota demi kota. Salah satu kota yang berhasil dikuasai oleh ISIS pada saat itu merupakan kota Mosul, salah satu kota terbesar di Irak dan setelah itu ISIS, melalui pemimpinnya Abu Bakar Al Baghdadi menyampaikan pengumuman di Masjid Agung Mosul bahwa ISIS resmi menjadi suatu negara dengan sistem Khilafah dan

mengajak para jihadis Islam di seluruh dunia untuk ikut bergabung dan berjuang dengan ISIS. Seiring berjalannya waktu, ISIS berhasil merekrut hampir 4.000 orang dari 100 negara (Specia, 2019).

## **B. Tujuan Utama ISIS**

Tujuan utama dari ISIS sebenarnya dapat dilihat langsung dari namanya yaitu *Islamic State of Iraq and Syria*. ISIS bertujuan untuk membentuk suatu negara Islam dengan sistem pemerintahan kekhalifahan. Kekhalifahan dapat diartikan sebagai kepemimpinan tradisional Islam dimana dipimpin oleh seorang Khalifah, yaitu pemimpin negara Islam penerus Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 2014, Abu Bakar Al Baghdadi menyatakan diri bahwa dia adalah seorang Khalifah dari negara Islam yang dibentuknya yaitu ISIS (Gladu, 2015).

Dalam praktiknya, ISIS menjalankan ideologi ekstremisnya dengan menyebarkan berbagai macam propaganda atas ambisinya untuk menguasai teritorial Timur Tengah seluas-luasnya. Bahkan ISIS merilis majalah online sendiri yang berjudul *Dabiq* untuk mendukung dan mengajarkan ideologinya kepada masyarakat. Ekstremisme ISIS dapat dilihat ketika ISIS membunuh bahkan membantai orang-orang yang dianggapnya tidak sejalan dengan ajaran ISIS, bahkan orang-orang yang juga beragama Islam akan dianggap kafir dan dibunuh jika tidak melaksanakan ajaran ISIS.

William Beeman, seorang ketua departemen antropologi di Universitas Minnesota Amerika Serikat berkata :

*“Mereka adalah Muslim fundamentalis, dan gagasan mereka tentang Islam sangat berbeda dari dunia Islam lainnya.”*

Hal ini menunjukkan bahwa ISIS ingin menjadikan seluruh negara di dunia ini menjadi negara Islam dengan ajaran tradisional atau lebih tepatnya, Islam versi ISIS sendiri karena ISIS menganggap Islam yang berbeda dengan ajaran yang disebarkan ISIS merupakan Islam yang sesat (Gladu, 2015).

ISIS menganggap bahwa hampir mayoritas negara Islam di dunia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dan sekuler dimana ISIS menganggap kedua sistem tersebut merupakan sistem ajaran kafir dan tidak menerapkan ajaran

Islam dalam bernegara sehingga sistem tersebut harus diganti menjadi sistem pemerintahan Islam. ISIS menganggap bahwa cara untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan mengajarkan dan menerapkan sistem pemerintahan Islam yang fundamentalis yaitu sistem kekhalifahan (Tambunan, 2014).

### **C. Kebijakan Luar Negeri Barrack Obama terhadap ISIS**

Pada masa kampanye, menghentikan perang yang terjadi di Timur Tengah telah menjadi salah satu janji Barrack Obama. Masyarakat Amerika Serikat berharap banyak kepada Presiden Barrack Obama agar menghentikan perang yang terjadi di Timur Tengah karena kondisi ekonomi di Amerika Serikat pada saat itu juga berada diambang krisis akibat borosnya dana untuk perang. Bahkan, ketika Obama berkampanye di North Carolina, Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 2008 Obama menyatakan bahwa hal pertama yang akan dilakukan ketika dirinya dilantik menjadi presiden Amerika Serikat adalah untuk menghentikan perang (Debora, Obama dan Janji untuk Hentikan Perang, 2017).

Barrack Obama akhirnya menepati janjinya ketika dilantik menjadi presiden. Jumlah pasukan Militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah berkurang. Pada Agustus 2010 Obama menarik pasukan militer terakhir yang berada di Irak, dengan menyisakan sekitar 50.000 pasukan untuk mempersiapkan proses peralihan pengamanan (Debora, Obama dan Janji untuk Hentikan Perang, 2017).

#### **1. Doktrin Obama**

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan ISIS pada era Barrack Obama dianggap mengalami pergeseran yang jauh jika dibandingkan dengan kebijakan yang diambil oleh presiden sebelumnya yaitu George Bush. Hal ini dapat dilihat ketika Barrack Obama lebih memprioritaskan untuk memperbaiki kondisi domestik Amerika Serikat. Terlebih, kondisi ekonomi Amerika Serikat saat itu berada di ambang krisis karena George Bush mengalokasikan dana yang sangat besar untuk berperang di Afghanistan dan Irak (Krieg, 2016).

Barrack Obama bersikeras bahwa Amerika Serikat sedang dalam kondisi yang mana diharuskan untuk menghemat pengeluaran negara. Untuk melakukan hal itu, Obama menganggap pengefektifan penggunaan kekuatan militer perlu dilakukan seperti memfokuskan penggunaan kekuatan militer bersama-sama atau penggunaan kekuatan multilateral dengan sekutu Amerika Serikat (Krieg, 2016).

Obama menekankan perlunya penggunaan *soft power* untuk bertindak bersama dengan sekutu dalam melawan musuh-musuh. Tetapi Obama juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional Amerika Serikat yang vital seperti ancaman-ancaman secara geografis (Krieg, 2016).

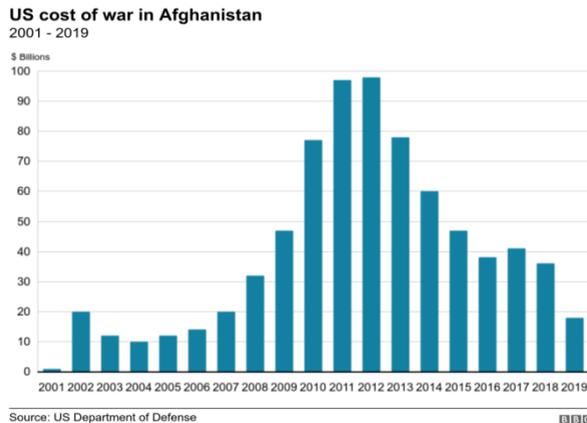
Dua faktor utama yang menyebabkan Barrack Obama menanamkan doktrin untuk mengefektifkan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat adalah sebagai respon terhadap masyarakat Amerika Serikat yang lelah akan peperangan yang menyebabkan lebih dari 6.000 pasukan militer Amerika Serikat tewas dan lebih dari 40.000 pasukan terluka kemudian yang menjadi faktor kedua adalah biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat saat perang adalah lebih dari 5,9 Miliar Dolar Amerika Serikat yang kemudian menyebabkan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang hampir krisis (Krieg, 2016).

## **2. Kebijakan Obama Terhadap Timur Tengah pada Periode Pertama**

Walau pada masa kampanye Barrack Obama sempat menjanjikan untuk menghentikan perang, Barrack Obama pada akhirnya tetap didesak oleh kondisi dimana dinamika yang terjadi di Afghanistan saat itu sangat mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat sehingga mengharuskan Obama untuk melanjutkan kebijakan *Global War On Terrorism* (GWOT) yang sebelumnya juga digunakan oleh George Bush untuk menstabilkan kondisi di Afghanistan. Obama juga kemudian menurunkan kembali pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan untuk

membantu proses pengalihan pemerintahan dan menanggulangi terorisme di Timur Tengah.

Meskipun pada awal periode Barrack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat telah dihadapkan dengan dinamika yang terjadi di Afghanistan , Obama juga memperhatikan isu-isu lainnya yang sama krusialnya dengan isu terorisme, yaitu ekonomi dan kemanusiaan. Ketika dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang hampir krisis karena Presiden Amerika Serikat sebelum Obama yakni George Bush menggelontorkan pundi-pundi yang tidak sedikit. George Bush menghabiskan dana sekitar 5,9 Miliar Dolar Amerika Serikat yang diambil dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup dana yang digelontorkan saat perang Irak, Afghanistan dan membiayai veteran-veteran perang (Debora, Biaya Perang AS di Timur Tengah dan Asia Capai Rp86.730 Triliun, 2018).



**Gambar 3. 1 Grafik Pengeluaran Amerika Serikat saat Perang Afghanistan**

*Sumber : BBC*

Bahkan kebijakan George Bush untuk mengalokasikan dana sosial Amerika Serikat untuk dialihkan terhadap dana

militer menyebabkan bencana bagi masyarakat Amerika Serikat yaitu meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran di Amerika Serikat (Westbrook, 2013). Isu kemanusiaan yang menjadi faktor lainnya bagi Obama untuk menentukan arah kebijakan luar negeri nya terhadap Timur Tengah dan ISIS adalah ketika terjadinya pelanggaran HAM berat di Irak, dimana ketika perang Irak banyak warga sipil yang terbunuh dan rusaknya fasilitas-fasilitas dan infrastruktur utama negara yang menyebabkan kebutuhan primer masyarakat Irak tidak terpenuhi, pun terkuaknya penyiksaan tahanan teroris di Guantanamo menjadi sorotan dunia sehingga Obama akhirnya juga menutup penjara Guantanamo dan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Irak (Bruce, 2009).

Isu kemanusiaan lainnya yang tak kalah penting untuk menjadi fokus bagi Barrack Obama adalah Islamophobia yang mengakibatkan buruknya citra Amerika Serikat di Dunia Islam. Pasca tragedi terorisme 9/11 di New York, Amerika Serikat saat masa kepemimpinan George W. Bush, Amerika Serikat acap kali menjalankan tindakan-tindakan represif sehingga memperburuk citra Amerika Serikat di Dunia Islam. Pengaruh orientasi Partai Demokrat yang mengusung Barrack Obama menjadi presiden juga berpengaruh karena Partai Demokrat juga cenderung ingin memperbaiki citra Amerika Serikat di Dunia Islam, oleh karena itu, Obama juga menarik simpati masyarakat Muslim di Amerika Serikat dengan menjanjikan untuk berperang melawan terorisme, bukan untuk melawan Dunia Islam. Obama juga lebih memilih untuk menggunakan *soft diplomacy* sebagai cara untuk memperbaiki citra Amerika Serikat di Dunia Islam dengan memprioritaskan jalur diplomatik.

### **3. Kebijakan Obama terhadap ISIS pada Periode Kedua**

Pada periode kedua Barrack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, terorisme tetap menjadi isu yang diperhatikan walaupun pada periode pertama Amerika Serikat berhasil membunuh buronan nomor satu nya yaitu

Osama bin Laden di Pakistan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa ancaman terorisme sudah berakhir.

Pada tahun 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi mengumumkan kepada dunia bahwa sebuah kelompok yang memiliki cita-cita untuk menjadikan seluruh dunia menjadi negara yang menggunakan sistem pemerintahan Islam sesuai dengan syariah yang fundamentalis atau sistem Khilafah yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) telah didirikan. Hal ini kemudian menjadi perhatian Barrack Obama karena terbentuknya ISIS juga mengisyaratkan bahwa terorisme akan kembali bangkit.

Seiring berjalannya waktu, ISIS menjelma menjadi sebuah kelompok yang mengerikan karena terus menyebar ancaman dan teror bagi pihak-pihak yang menghambat cita-cita ISIS yaitu mendirikan negara Islam. ISIS mempromosikan propaganda nya yaitu ketika berjuang untuk ISIS maka hal tersebut akan dianggap sebagai Jihad dan akan mengantarkan orang tersebut ke surga. Propaganda tersebut digunakan oleh ISIS untuk menarik minat dan simpati masyarakat dunia untuk ikut berjuang atau lebih tepatnya untuk ikut menyebar teror di dunia. ISIS sempat memperingatkan Amerika Serikat agar jangan menghambat usaha ISIS dalam mencapai cita-citanya dengan cara mengunggah video pemenggalan seorang jurnalis Amerika Serikat ke *Youtube*, James Foley yang telah hilang sejak tahun 2012 dan diduga diculik di wilayah utara Suriah (Utami R. V., 2014).

Bahkan Gedung Putih mendapat sebuah video ancaman dari ISIS bahwa ISIS akan mengambil alih wilayah Amerika Serikat dan kemudian memenggal kepala Barrack Obama. Ancaman tersebut diberikan setelah Amerika Serikat berusaha untuk memerangi ISIS di Suriah. Ancaman ini bukanlah sekedar ancaman, pada tahun 2015 terjadi sebuah tragedi di Texas ketika sedang berlangsung acara pameran lukisan, dua orang melakukan serangan dengan melakukan aksi penembakan. Aksi ini dapat diatasi oleh Polisi Negara Bagian Texas. Satu hari setelah kejadian tersebut, ISIS mengklaim bahwa dua orang pelaku penembakan tersebut

merupakan dua anggota ISIS yang sedang berjuang di Amerika Serikat (detiknews, 2015).

Barrack Obama merespon tindakan teror yang dilancarkan oleh ISIS tersebut dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk melawan ISIS. Obama pada awalnya mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk memerangi ISIS karena ISIS merupakan musuh bersama yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kepentingan Amerika Serikat. Obama mulai menggunakan kebijakan pengawasan melalui *Freedom Act* yang sebelumnya merupakan kebijakan *Patriot Act* yang dicanangkan oleh George W. Bush (Utami W. M., 2015).

Sebelumnya, Barrack Obama mengganti kebijakan *Patriot Act* yang dicanangkan oleh George W. Bush menjadi *USA Freedom Act. Patriot Act* dibuat dengan maksud untuk memberi wewenang kepada lembaga eksekutif Amerika Serikat untuk menahan dan menindak lanjuti imigran-imigran Muslim yang dicurigai terlibat dengan terorisme dengan dalih untuk menjaga stabilitas keamanan dan kepentingan Amerika Serikat sehingga kebijakan tersebut dianggap merugikan dan mengancam hak kebebasan masyarakat Muslim yang tinggal di Amerika Serikat karena pasca tragedi 9/11 timbul generalisasi bahwa Islam adalah teroris (Utami R. V., 2014).

Kebijakan *Freedom Act* yang diambil oleh Barrack Obama diloloskan oleh kongres kemudian membatasi *National Security Agency* (NSA) yang sebelumnya dapat memata-mematai Masyarakat Islam Amerika Serikat dengan semena-mena menjadi harus mendapat persetujuan dari persidangan terlebih dulu. Meskipun tindakan untuk memata-matai warga Amerika Serikat tetap dijalankan tetapi Obama menekankan bahwa tindakan ini dilakukan melalui persetujuan persidangan dan merupakan tindakan pengawasan yang terbuka (Utami W. M., 2015).

Pada tahun 2014, Obama juga membentuk koalisi dunia untuk mengalahkan ISIS bersama-sama dengan 81 negara lainnya seperti Italia, Jerman dan Denmark. Amerika Serikat juga menggandeng negara-negara di Timur Tengah

untuk menghadapi ISIS bersama-sama. Secara umum, koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat memiliki 5 tujuan utama sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan militer kepada mitra koalisi;
- b. Menghambat aliran pejuang ISIS;
- c. Menghentikan pendanaan teroris;
- d. Mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah konflik; dan
- e. Mengungkap sifat sejati.

Koalisi Internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini bukan semata-mata menggunakan kekuatan militer saja, melainkan tenaga medis dan relawan kemanusiaan lainnya juga diperlukan untuk berkontribusi. Berbagai aspek perlu menjadi perhatian seperti aspek ekonomi yaitu untuk menghambat aliran dana terhadap ISIS sehingga dapat menghambat ISIS dalam mencapai cita-citanya. Bantuan kemanusiaan juga diberikan untuk masyarakat-masyarakat sipil yang terkena dampak konflik dengan ISIS. Bantuan-bantuan tersebut diberikan dengan tujuan menjaga stabilitas di wilayah konflik. Bahkan Arab Saudi memberi bantuan sebesar 500 Juta Dolar Amerika sebagai bentuk bantuan kemanusiaan seperti pemberian tempat tinggal, pemberian kebutuhan pangan serta obat-obatan di Irak (U.S Department of State).

Barrack Obama juga menyatakan bahwa untuk mengalahkan ISIS, dibutuhkan strategi yang melibatkan pasukan militer bahkan penduduk lokal untuk terlibat karena tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan ISIS sehingga cita-cita ISIS akan gagal bukan untuk menguasai negara tersebut. Obama juga mengatakan bahwa menurunkan terlalu banyak pasukan militer di Suriah bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan contoh (D. Shear & Baker, 2015).

Kebijakan tersebut diambil mengingat Barrack Obama juga tetap memberikan perhatian terhadap isu Islamophobia. Juga dipengaruhi oleh doktrin yang dipromosikan Obama pada awal periode menyebabkan Obama tidak semena-mena dalam mengatasi ISIS sehingga kebanyakan kebijakan yang diambil Obama untuk melawan ISIS adalah dengan membantu dan melatih pasukan perjuangan atau pasukan militer lokal untuk melawan ISIS.

Obama kemudian tetap melakukan tindakan militer untuk mengatasi ISIS. Pada tahun 2015, Barack Obama memerintahkan untuk menurunkan 50 Pasukan Militer Amerika Serikat ke Suriah untuk melawan ISIS di Suriah. Kebijakan Obama untuk menurunkan pasukan militer Amerika Serikat di Suriah didasari untuk membantu pasukan perjuangan lokal Suriah dalam mengkoordinasikan koordinat dan memaksimalkan koalisi sekutu Amerika Serikat, bukan dengan langsung menyerang ISIS (Roberts, 2015).

Obama juga kemudian memerintahkan Pentagon untuk menurunkan ribuan pasukan militer Amerika Serikat di Irak dimana pasukan lokal Irak juga sedang berjuang untuk mengalahkan ISIS. Obama menyebut tindakan ini sebagai peran konsultan dan pelatih bagi pasukan lokal Irak untuk berjuang melawan ISIS. Pasukan militer Amerika Serikat membantu dengan cara memimpin kegiatan latihan pasukan militer Irak dan membantu menentukan posisi koordinat untuk melakukan serangan udara. Pentagon menyatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat jarang terlibat peperangan secara langsung dengan pasukan ISIS (Roberts, 2015).

Kebijakan Obama yang lebih memilih untuk membantu pasukan lokal untuk melawan ISIS daripada untuk terlibat langsung dalam peperangan juga dipengaruhi oleh orientasi Partai Demokrat yang lebih condong untuk memberi tahu masyarakat Amerika Serikat bahkan masyarakat Dunia bahwa ISIS merupakan musuh bersama dan merupakan ancaman bagi semua pihak, termasuk juga masyarakat Muslim sehingga kebijakan yang diambil Obama tentu akan melibatkan seluruh pihak seperti koalisi dan sekutu Amerika Serikat untuk melawan ISIS (Gorman, 2015).

#### **D. Kebijakan Luar Negeri Donald Trump terhadap ISIS**

Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat yang menjabat setelah kepemimpinan Barack Obama berakhir. Donald Trump sendiri berasal dari Partai Republik, yaitu rival Partai Demokrat dalam pemilihan umum presiden di Amerika

Serikat. Tentu saja, Partai Republik memiliki orientasi dan cara yang berbeda dari Partai Demokrat dalam menghadapi isu-isu yang sedang berlangsung, termasuk isu terorisme dan ISIS. Jika Partai Demokrat memilih jalan yang lebih halus dalam menangani isu terorisme, Partai Republik justru sebaliknya.

Hal ini dapat dilihat ketika Partai Republik menganggap bahwa cara terbaik untuk melawan terorisme adalah dengan menyerang mereka di tempat asal mereka untuk menghindari kelompok teroris tersebut menyerang dan melakukan teror di tanah Amerika Serikat. Partai Republik bahkan mengkritik kebijakan yang diambil Obama sebelumnya karena dianggap terlalu lemah dan terlalu takut untuk menyerang kelompok teroris. Partai Republik menganggap bahwa dalam situasi saat ini, dimana ISIS semakin menggila dalam melancarkan serangan-serangan teror, anggaran pertahanan dan militer harus dinaikan dan persiapan melakukan serangan ofensif harus dilakukan (REPUBLICANVIEWS.ORG, 2018).

Hal tersebut tentu mempengaruhi Donald Trump dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya untuk menghadapi ISIS. Donald Trump menganggarkan dana lebih banyak untuk memerangi ISIS dan membiayai senjata. Dari gambar dibawah dapat dilihat bagaimana Donald Trump menggelontorkan dana lebih besar untuk melatih militer dalam menghadapi ISIS dan untuk membiayai senjata dari beberapa tahun sebelumnya ketika Barack Obama menjabat (Blanchard & Humud, 2018).

	FY2015	FY2016	FY2017 Requests	FY2018 Iraq-Specific Request	FY2019 Iraq-Specific Request
Iraq Train and Equip Fund	1,618,000	715,000	630,000 289,500	-	-
Counter-ISIS Train and Equip Fund			446,400	1,269,000	850,000
<b>Total</b>	<b>1,618,000</b>	<b>715,000</b>	<b>1,365,900</b>	<b>1,269,000</b>	<b>850,000</b>

**Gambar 3. 2 Anggaran Amerika Serikat dalam Menghadapi ISIS**

*Sumber : The Islamic State and U.S. Policy, Christopher M. Blanchard & Carla E. Humud*

Kebijakan yang diambil Donald Trump terhadap Dunia Islam pun dianggap seolah-olah membawa isu Islamophobia kembali memanas di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Donald Trump yang sangat mendiskrimansi umat Islam di Amerika Serikat, bahkan umat Islam dunia. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Pew Research Centre*, dalam masa kepemimpinan Trump, hampir setengah warga Muslim Amerika Serikat mengalami diskriminasi seperti 19% responden mengatakan bahwa mereka mendapat perlakuan diskriminasi di bandara hanya karena tertulis beragama Islam didalam kartu identitasnya. Kemudian, beberapa Muslim lainnya juga mengaku bahwa mereka sering mendapat panggilan ejekan hanya karena memakai busana yang bernuansa Islami (Citra, 2017)

Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diambil oleh Donald Trump kemudian berpengaruh terhadap pandangan masyarakat Amerika Serikat terhadap terorisme. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Pew Research Centre* beberapa masyarakat Amerika Serikat menganggap bahwa mereka berpikir terkadang tindakan kekerasan terhadap warga sipil Muslim dapat dibenarkan untuk menangkal terorisme, bahkan masyarakat umum lebih menganggap bahwa Umat Islam di Amerika Serikat sebagai pendukung terorisme dan ekstrimisme (BBC Indonesia, 2017).

### **1. Kebijakan Ofensif Donald Trump terhadap ISIS**

Pada awal periode menjabat, Donald Trump langsung menunjukkan keseriusannya dalam melawan dan menumpas ISIS. Kebijakan ofensif tersebut dapat dilihat ketika Donald Trump memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat untuk melakukan serangan udara dengan menjatuhkan bom yang diklaim sebagai bom terbesar yang dimiliki Amerika Serikat yaitu *GBU – 43 Massive Ordnance Air Blast* dan dijuluki dengan sebutan *Mother of All Bombs (MOAB)*. Bom tersebut dijatuhkan di wilayah persembunyian ISIS di terowongan bawah tanah dan gua buatan ISIS di kawasan pegunungan di Provinsi Nangarhar yang menyebabkan ledakan dahsyat dan menimbulkan bola api yang sangat

besar. Pasukan militer Amerika Serikat memilih untuk menjatuhkan MOAB di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang sulit dijangkau oleh pasukan militer Amerika Serikat sehingga dengan hancurnya wilayah tersebut dapat memudahkan pasukan militer Amerika Serikat dalam memerangi ISIS (Tempo.co, 2019).

Ledakan besar yang diakibatkan oleh MOAB menyebabkan ratusan pasukan ISIS tewas dan terkubur didalam goa yang mereka ciptakan. Kerusakan-kerusakan besar lainnya pun dapat dilihat dari bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara setelah pasukan militer Amerika Serikat menjatuhkan MOAB, dimana hampir seluruh area menjadi kering dan pohon-pohon terlihat gosong terbakar, tetapi Kepala Kepolisian setempat, Mayor Khair Mohammad Sapai mengatakan bahwa ISIS telah menciptakan banyak goa seperti ini, jadi, serangan MOAB tentu bukanlah serangan pamungkas yang akan menghancurkan ISIS, serangan tersebut hanyalah seperti serangan-serangan lainnya, pasukan militer Amerika Serikat harus memerangi ISIS di tempat lainnya seperti goa ini untuk benar-benar mengalahkan ISIS (BBC, 2017).

Donald Trump juga tidak melupakan untuk memanfaatkan Koalisi Internasional yang dibentuk oleh Presiden Barrack Obama pada tahun 2014 yang lalu. Bahkan serangan-serangan yang dilancarkan Koalisi Internasional dibawah pimpinan Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump menjadi lebih ofensif. Hal tersebut dapat dilihat ketika pada tanggal 17 Maret 2017 pasukan militer Koalisi Internasional menjatuhkan bom terhadap sebuah gedung dengan tujuan untuk membunuh dua orang penembak jitu ISIS. Tetapi serangan tersebut justru menghancurkan gedung tersebut dan menewaskan 105 warga sipil (Borger, Civilian deaths from US-led strikes on Isis surge under Trump administration, 2017).

Bom yang dijatuhkan pasukan Koalisi Internasional tersebut dianggap berlebihan jika hanya bertujuan untuk membunuh 2 penembak jitu ISIS. Pada serangan lainnya, pasukan Koalisi Internasional juga terpaksa untuk

membunuh ratusan warga sipil lainnya karena gerilyawan ISIS menggunakan ratusan warga sipil sebagai tameng mereka menghadapi serangan. Pasukan Gerilyawan ISIS membaaur dengan warga sipil sekitar untuk berkamufase agar tidak diserang oleh pasukan Koalisi Internasional sehingga pasukan Koalisi Internasional dihadapkan dengan kondisi dimana mereka menyerang wilayah tersebut dan menyebabkan 800 warga sipil tewas. Hal tersebut juga mendapat perhatian dari *Human Right Watch* (HRW), sebuah Organisasi Internasional non-Pemerintah yang berfokus pada isu-isu HAM karena tindakan pasukan Koalisi Internasional dalam menyerang pasukan ISIS dianggap tidak tepat dan berlebihan (Borger, *Civilian deaths from US-led strikes on Isis surge under Trump administration*, 2017).

HRW melalui wakil direktornya, Ole Solvang menyatakan bahwa HRW menjadikan kasus terbunuhnya ratusan warga sipil oleh pasukan Koalisi Internasional yang dipimpin Amerika Serikat sebagai hal yang serius. HRW mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam menjunjung tinggi isu kemanusiaan ini. Pasukan Koalisi Internasional menyatakan bahwa mereka akan melakukan penyidikan terhadap insiden ini tetapi tidak ada tindakan konkrit yang dilakukan oleh pasukan Koalisi Internasional, bahkan bukti-bukti insiden yang diberikan kepada tim penyidik HRW sangat sedikit menjadikan seolah-olah tindakan yang dilancarkan oleh pasukan Koalisi Internasional bukanlah sebuah masalah besar (*Human Right Watch*, 2017).

Serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Amerika Serikat beserta pasukan Koalisi Internasional bukannya tidak memberi hasil. Setelah berbagai macam bom dan tembakan yang diledakan untuk melawan pasukan-pasukan ISIS, diperkirakan pada tahun 2017 jumlah pasukan ISIS berkurang drastis menjadi 28.600 orang.

Sebelumnya, pasukan ISIS sempat bangkit dimana kekuatan ISIS saat itu hampir menyamai dengan kekuatan ISIS ketika baru saja dideklarasikan. Kebangkitan ini diduga

akibat kegagalan pasukan Amerika Serikat dan pasukan Koalisi Internasional yang dianggap terlalu boros anggaran yaitu hampir menggelontorkan dana sebesar 14,3 Miliar Dolar Amerika sementara taktik yang digunakan tidak begitu cermat. Sehingga kebangkitan ISIS ini menyebabkan jumlah pasukan ISIS mencapai angka 33.000 orang. Tetapi justru hal ini lah yang menjadi evaluasi bagi pasukan militer Amerika Serikat beserta pasukan Koalisi Internasional untuk membenahi taktik dan kembali menyerang ISIS sehingga kebangkitan ISIS tersebut dapat diatasi (Liputan6.com, 2018).

## **2. Penarikan Pasukan & Kejatuhan ISIS**

Pada bulan September 2018, Pasukan Koalisi Internasional dibawah pimpinan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka baru saja melancarkan sebuah serangan pamungkas untuk menghancurkan ISIS. Melalui *Syrian Democratic Forces* (SDF) yang merupakan bagian dari Koalisi Internasional dibawah pimpinan Amerika Serikat melakukan serangan darat terhadap pasukan ISIS di wilayah lembah Sungai Eufrat. Sekitar 17.000 pasukan ISIS diperkirakan berada di Irak sehingga kemudian SDF memfokuskan untuk melancarkan serangan di wilayah Irak.

Selama empat bulan terakhir, Pasukan Koalisi Internasional melakukan serangan darat dan berhasil melumpuhkan wilayah kekuasaan ISIS yaitu daerah Baghuz, Dakhla dan yang terakhir Pasukan Koalisi Internasional berhasil merebut Provinsi Deir al-Zour dari kekuasaan ISIS. Pasukan Koalisi Internasional bersama dengan pasukan militer Amerika Serikat bertekad untuk menyudahi kekuasaan ISIS di wilayah tersebut dan mengakhiri penderitaan warga sipil setempat. Pasukan Koalisi Internasional beserta pasukan militer Amerika Serikat juga menyediakan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil setempat (BBC Indonesia, 2018).

Hal ini kemudian menyebabkan Donald Trump memutuskan untuk menarik 2000 pasukan militer Amerika Serikat dari Timur Tengah. Hal ini dilakukan Trump karena

kekuatan ISIS saat itu sudah sangat melemah dan Trump mengklaim dirinya memiliki alternatif lain untuk tetap mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah (Borger, Trump Shocks Allies with Advisers with a Plan to Pull US Troops out of Syria, 2018).

Keputusan yang dilakukan Trump untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Timur Tengah mendapat banyak kritikan dari Koalisi Internasional bahkan dari pejabat kepresidenan yang berasal dari Partai Republik sendiri. Hal ini tentu saja mengejutkan Koalisi Internasional, mereka menganggap bahwa kekuatan ISIS justru bisa kembali bangkit jika pasukan militer Amerika Serikat dipulangkan kembali ke Amerika Serikat. Para pejabat Partai Republik pun menyatakan bahwa keputusan Trump untuk menarik kembali pasukan militer Amerika Serikat sebagai sebuah kesalahan besar seperti keputusan Obama yang dilakukan pada periode yang lalu. Bahkan, Inggris menanggapi keputusan Trump ini bukan pertanda akan kejatuhannya ISIS melainkan kesempatan bagi ISIS untuk kembali bangkit (Borger, Trump Shocks Allies with Advisers with a Plan to Pull US Troops out of Syria, 2018).

Politisi Partai Republik Amerika Serikat menanggapi kebijakan Trump untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Timur Tengah justru akan membuka jalan bagi musuh-musuh Amerika untuk menanamkan pengaruhnya di Timur Tengah bahkan dianggap mengkhianati komitmen Amerika Serikat terhadap koalisi-koalisi dan sekutunya untuk menumpas terorisme di Timur Tengah, dalam kasus ini, untuk menumpas ISIS. Bahkan Trump dianggap seperti menjilat ludah sendiri, karena apa yang dilakukan Trump saat itu tidak sesuai dengan ucapan-ucapannya saat kampanye, yaitu untuk menumpas habis ISIS dan terorisme (Borger, Trump Shocks Allies with Advisers with a Plan to Pull US Troops out of Syria, 2018).

Sekutu-sekutu Amerika Serikat juga merasa dibohongi oleh Amerika Serikat karena keputusan tersebut seolah-olah diputuskan oleh Trump seorang diri tanpa melakukan konsultasi dengan negara sekutu lainnya. Bahkan perwakilan

diplomata dari beberapa negara sekutu menyatakan bahwa keputusan Trump tersebut adalah sebuah kejutan besar bagi mereka (Borger, Trump Shocks Allies with Advisers with a Plan to Pull US Troops out of Syria, 2018).

Menanggapi banyaknya kritikan dari berbagai pihak, Donald Trump akhirnya membatalkan keputusannya tersebut. Seorang pejabat dari Gedung Putih mengatakan bahwa pasukan militer Amerika Serikat bersama dengan pasukan Koalisi Internasional akan terus berperang di Timur Tengah untuk menjatuhkan ISIS. Dia mengatakan bahwa sekarang kekuatan ISIS memang sudah melemah dan tugas pasukan militer Amerika Serikat beserta dengan pasukan Koalisi Internasional adalah untuk menuntaskan keberadaan ISIS di Timur Tengah.

Strategi yang digunakan oleh pasukan militer Amerika Serikat beserta pasukan Koalisi Internasional setelah kondisi ISIS yang makin lemah adalah fokus untuk menyerang sisa-sisa wilayah yang masih ditempati dan dikuasai oleh ISIS. Pasukan Amerika Serikat beserta pasukan Koalisi Internasional yaitu SDF melancarkan sebuah serangan udara di atas desa Baghouz dimana wilayah tersebut diklaim sebagai wilayah terakhir kekuasaan ISIS di Timur Tengah. SDF beserta militer Amerika Serikat membajak *walkie talkie* milik ISIS sehingga mereka dapat dengan jelas mengetahui posisi pasukan ISIS di Baghouz. Bahkan mereka telah menjaga di 14 titik untuk mengepung pasukan ISIS di desa Baghouz. Kemudian, SDF beserta militer Amerika Serikat menghujani Baghouz dengan sertangan martil dari udara, dalam kondisi kalah jumlah, ratusan pasukan ISIS akhirnya menyerah kepada SDF dan militer Amerika Serikat (Yasinta, 2019).

Usaha-usaha untuk menumpas habis ISIS di Timur Tengah secara konsisten terus dilakukan. Usaha pasukan militer Amerika Serikat beserta pasukan Koalisi Internasional untuk menumpas ISIS dipastikan selesai karena Donald Trump telah menyatakan bahwa ISIS telah 100% ditumpas. Pada bulan Maret 2019 Donald Trump bersama dengan pasukan militer Amerika Serikat dan

pasukan Koalisi Internasional merayakan dan mendeklarasikan kemenangannya atas ISIS (Givtash, 2019).

Pada bulan Oktober 2019, pasukan militer Amerika Serikat memulai sebuah operasi untuk memburu pemimpin ISIS yang terakhir yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Pasukan militer Amerika Serikat pada awalnya memburu Al-Baghdadi lewat helikopter yang dikendarai oleh pasukan *Delta Force* untuk menentukan koordinat lokasi persembunyian Al-Baghdadi. Pertarungan darat terjadi sangat sengit, beberapa pasukan ISIS yang tersisa tewas ditembak oleh pasukan militer Amerika Serikat. Bahkan 2 orang istri Al-Baghdadi turut tewas dalam operasi tersebut. Habisnya pasukan ISIS yang tersisa dan banyaknya jumlah pasukan militer Amerika Serikat akhirnya memojokan Al-Baghdadi dan mengirimnya kepada situasi dimana dia harus melarikan diri. Al-Baghdadi akhirnya melarikan diri ke dalam suatu goa dengan mengenakan rompi bunuh diri serta membawa 3 orang anaknya. Pasukan militer Amerika Serikat yang telah mengetahui lokasi Al-Baghdadi terus mengejar dan memojokan Al-Baghdadi hingga akhirnya dia meledakan dirinya di dalam sebuah terowongan dan menewaskan dirinya beserta 3 orang anaknya (Tempo.co, 2019).